

EKONOMI POLITIK INDONESIA DITENGAH PANDEMI COVID-19

Perkembangan kasus Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di seluruh dunia begitu pesat. Banyak negara yang warganya telah menjadi korban dan pasien dari virus ini. Tidak hanya korban jiwa dan pasien yang tengah lemah terinfeksi, dampak dari pandemi ini juga merambat pada berbagai sektor kehidupan lainnya, seperti halnya sektor ekonomi dan politik. Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup merasakan dampak dari kasus ini.

Buku ini memuat serangkaian bahasan yang aktual dan kritis mengenai dampak, perkembangan, dan situasi-situasi yang terjadi pada lingkup Ekonomi Politik di masa pandemi Covid-19. Pembahasan difokuskan pada negara Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan ribuan pasien positif corona. Melihat berbagai fenomena yang terjadi dan melakukan kajian yang hasilnya dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan dalam menyelesaikan gejolak ekonomi politik di tengah Pandemi.

Penerbit :

Cakradewa Ilmu

Jl. Lesanpura No.498 Teluk, Kec. Purwokerto Selatan

Kabupaten Banyumas 53145

Telp. 08783404858

cakradewailmu.press@gmail.com

ISBN : 978-623-93569-0-3



EKONOMI POLITIK INDONESIA DITENGAH PANDEMI COVID-19



Editor : Arimurti Kriswibowo, S.I.P., M.Si
Co-Editor : S. Andre Prasetyo Utomo

Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Editor
Arimurti Kriswibowo

Co-Editor:
S.Andre Prasetyo Utomo

Penerbit :
Cakradewa Ilmu

Ekonomi Politik Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

Tim Editor :
Arimurti Kriswibowo
S. Andre Prasetyo Utomo

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia
oleh :
Cakradewa Ilmu
Jl.Lesanpura No.498 Teluk, Kec. Purwokerto Selatan
Kab. Banyumas 53145
Telp . 087838404858
Email : cakradewailmu.press@gmail.com

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memproduksi atau memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku ini tanpa seijin tertulis dari
penerbit.

ISBN : 978-623-93569-0-3

Terbitan Pertama, April 2020

KATA PENGANTAR

Buku “Ekonomi Politik Indonesia ditengah pandemi COVID-19” memuat serangkaian bahasan yang aktual dan kritis mengenai dampak, perkembangan, dan situasi-situasi yang terjadi pada lingkup Ekonomi Politik di masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Memfokuskan pembahasan pada Negara Indonesia yang menjadi salah satu negara terdampak dengan ribuan pasien positif COVID- 19. Melihat berbagai fenomena yang terjadi dan melakukan kajian yang hasilnya dapat dijadikan bahan rumusan kebijakan menyelesaikan gejala ekonomi politik di tengah Pandemic.

Buku ini disusun dengan segala daya dan upaya ditengah situasi yang serba terbatas. Ini merupakan tulisan terseleksi dari pemikiran-pemikiran para mahasiswa Administrasi Publik UPNVJT. Menyikapi hal tersebut, kami selaku editor dan penulis tak serta-merta jumawa dan senantiasa menyadari bahwa dalam penulisan maupun penyusunan buku ini terdapat kekurangan. Apabila ada kesalahan, tidaklah lepas dari editor dan para penulis sendiri, dan apabila ada kebenaran dan nilai manfaat dalam buku ini, semata-mata karena bantuan berbagai pihak.

Pada akhirnya kami selaku tim editor mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berperan serta untuk diterbitkannya buku ini secara layak. Besar harapan kami agar kelak buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Sekian.

Surabaya, 22 April 2020

Tim Editor

DAFTAR ISI

Melihat COVID-19 dalam Perspektif Ekonomi Politik.....	1
Analisis Pandemi COVID-19 di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Politik Menggunakan Pendekatan Neo Klasik.....	9
COVID-19: Kapitalisme di Balik Pandemi?.....	15
Lonjakan Pasien Virus Corona Drastis, Perluakah <i>Lockdown</i> ? Pemerintah Jangan Menyesal.....	21
Skeptisme Masyarakat di Tengah Pandemi Global : “Pemerintah Bisa Apa?”	25
Dampak Wabah COVID-19 terhadap Pekerja OJOL (Ojek Online) di Kota Pasuruan.....	29
COVID-19 dalam Perspektif Ekonomi Politik.....	35
Kucing Asia Terinfeksi Corona.....	39
Corona Virus Si Kecil yang Mematikan.....	45
Wabah COVID-19 Mempengaruhi Ekonomi Politik.....	49
Kebijakan <i>Lockdown</i> : Kesehatan Masyarakat atau Stabilitas Ekonomi...	53

MELIHAT COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Rr. Dhea Cinthya Safiradewi D.

Pada saat ini dunia tengah digemparkan oleh fenomenologi yang mampu membuat *World Health Organizer (WHO)* menetapkan status darurat internasional. Fenomena tersebut berhubungan dengan aspek kesehatan, yaitu sebuah virus. Virus ini dikenal dengan nama COVID-19 atau Corona, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di wilayah Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada awalnya, virus ini hanya berkembang dan menyebar di wilayah China, namun seiring berjalannya waktu, COVID-19 kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia. Beberapa negara besar seperti Amerika, Rusia, Korea selatan, Jepang bahkan Indonesia juga tidak luput dari penyebaran virus Corona. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia dengan Gejala awal seperti batuk-batuk, demam, sesak nafas, sakit tenggorokan, dan lemas letih. Gejala awal yang cukup umum tersebut mengakibatkan masyarakat Indonesia kesulitan mengidentifikasi apakah dia terjangkit Virus Corona atau hanya mengalami demam biasa. Hingga saat ini belum ditemukan obat khusus untuk menyembuhkan pasien yang dinyatakan positif COVID-19. Disisi lain, kurangnya kesiapan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi fenomena tersebut, berdampak pada kurangnya tenaga medis, minimnya Alat Pelindung Diri (APD) bahkan beberapa rumah sakit tidak mampu menyediakan ruangan khusus pasien positif Corona, akibatnya terjadi lonjakan jumlah pasien positif Virus Corona dan tidak sedikit pasien yang pada akhirnya meninggal karena Virus Corona. Padahal, pelayanan

kesehatan di Indonesia menjadi sesuatu yang harus ditingkatkan mengingat jumlah penduduk di Indonesia merupakan salah satu negara terbesar dalam hal kuantitas (Ritonga, Solikhun, Lubis, & Windarto, 2018).

Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia sampai dengan hari ini terus meningkat menjadi 893 orang, 78 meninggal, dan 35 sembuh. Tingkat penyebaran virus COVID-19 sangat cepat, hingga pada akhirnya menyebabkan beberapa daerah di Indonesia ditetapkan sebagai zona merah, hal ini mengakibatkan masyarakat semakin panik. Fenomena tersebut disebut “*panic buying*”, kepanikan tersebut menyebabkan masyarakat membeli kebutuhan pokok, masker dan hand sanitizer dalam jumlah yang sangat banyak sehingga mengakibatkan persediaan barang-barang tersebut kian menipis dan langka. Kalaupun ada, barang seperti masker dan handsanitizer saat ini harganya sudah melonjak tinggi dan jauh diatas harga normal. Permasalahan tersebut sama seperti penjelasan teori ekonomi *supply and demand* yaitu apabila permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harga juga akan menjadi lebih tinggi atau naik. Otomatis hal ini menjadikan permasalahan baru yang hadir di tengah pandemic global, terutama di Indonesia. Apabila harga barang-barang tersebut menjadi semakin mahal, maka akan timbul kesenjangan sosial di masyarakat. Hanya masyarakat golongan menengah ke atas yang mampu membeli alat pelindung kesehatan tersebut. Lantas bagaimana dengan golongan masyarakat menengah ke bawah? Untuk membeli kebutuhan pokok setiap harinya mereka harus bekerja keras apalagi untuk membeli persediaan obat, masker, ataupun handsanitizer yang harganya sudah melambung tinggi. Padahal jika dilihat kembali, masyarakat kecil juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan kesehatan layaknya masyarakat menengah ke atas.

Pendekatan ekonomi politik mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang di introdusir oleh pemerintah (Ruslin, 2012). Dalam sistem ekonomi liberal kapitalis dan ekonomi klasik, fenomena yang terjadi saat ini adalah kegagalan sistem akibat menjalankan mekanisme pasar bebas, dampaknya para kapital kemudian memanfaatkan lonjakan permintaan barang untuk melakukan monopoli, hal ini dilakukan agar mereka dapat menjual barang dengan harga jual yang sangat tinggi. Pemerintah Indonesia memang tidak sepenuhnya menerapkan sistem ekonomi liberal kapitalis secara penuh. Indonesia cenderung menerapkan sistem ekonomi neo-klasik sehingga pemerintah masih dapat mengintervensi pasar untuk menstabilkan harga barang yang langka di pasaran, agar harganya dapat ditekan dan tidak terlalu mahal seperti saat ini. Tentunya dalam menyikapi hal ini perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, tidak hanya berkoar-koar saja namun juga melakukan langkah tegas. Kita melihat negara-negara lain mulai gencar melakukan *Lockdown* yaitu kondisi dimana kita tidak boleh meninggalkan tempat tinggal sama sekali. Ruang gerak dibatasi bahkan semua akses jalan ditutup sehingga terlihat seperti kota mati. Namun berbeda dengan Indonesia, bukan *Lockdown* melainkan *social distancing*, hal yang terlihat serupa namun tidak sama. Pemerintah Pusat menolak memberlakukan *Lockdown* semata-mata karena adanya ancaman akan terjadi krisis ekonomi, namun tidak mempertimbangkan ancaman krisis lainnya. Ancaman krisis keselamatan masyarakat tentu menjadi argumentasi yang lebih kuat dalam pemikiran banyak orang saat ini. Segala sector potensial akan terganggu apabila Pemerintah mengeluarkan kebijakan *Lockdown*. Dampaknya proses produksi akan terhenti serta dapat menyebabkan instabilitas sosial dan ekonomi. Mari

kita lihat dari kaca mata politik, muncul perdebatan terkait dilakukannya *Lockdown* atau tidak dikarenakan adanya kerentanan ekonomi yang secara nyata juga harus diakui, tingkat kebergantungan terhadap pasar yang tinggi. Misalnya di sector ekonomi, khususnya di bidang pangan, apabila secara politis memilih kebijakan program ketahanan pangan ketimbang kedaulatan pangan, terutama kran impor pangan yang dibuka lebar, maka pandemic global COVID-19 dan *Lockdown* inilah yang akhirnya menjadi ancaman. Importasi pangan sesungguhnya hanya menunjukkan betapa lemahnya politik-ekonomi pangan di Indonesia, bahkan ketika mampu mengekspor pangan, seharusnya terjadi ketika ada surplus didalam pasar pangan domestic atau di dalam negeri.

Social distancing menjadi salah satu di antara beberapa himbauan pemerintah yang juga mengacu pada instruksi dari WHO untuk memerangi persebaran virus COVID-19. *Social distancing* ini sendiri merupakan pembatasan sosial atau menjaga jarak yang dilakukan sebagai tindakan pengendalian agar memperlambat penyebaran virus dan atau menghentikan penyebaran penyakit menular. Pemerintah Pusat menerapkan *social distancing* dengan tujuan agar masyarakat tidak keluar rumah, terkecuali memiliki kepentingan yang cukup *urgent*, namun dihibau untuk tetap menjaga jarak antar perorangan. Kebijakan ini merupakan pembatasan ruang gerak masyarakat yang juga menjadi polemik di masyarakat. Pemerintah menetapkan kebijakan ini dengan memberlakukan *Work From Home (WFH)*, pemberhentian sementara aktivitas belajar mengajar di lingkungan sekolah maupun universitas dan digantikan dengan belajar mengajar melalui media daring/online, serta baru-baru ini terdengar adanya sanksi bagi siapapun yang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa.

Gerakan #dirumahaja dalam rangka penerapan *social distancing* ini juga tidak luput dari adanya perdebatan masyarakat. Bagaimana tidak, pekerja informal seperti penjual makanan, ojek online, hingga tukang becak tidak dapat melakukan hal tersebut. Jika mereka dipaksa untuk tetap tinggal dirumah, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya?. Selain itu, kebijakan *social distancing* juga berdampak pada sektor industri dan pariwisata. Pusat-pusat perbelanjaan seperti pasar yang biasanya ramai dikunjungi masyarakat sekarang justru sepi pembeli, hotel-hotel yang biasanya ramai saat ini juga sepi pengunjung, bahkan di Bali banyak hotel yang ditutup menyebabkan para pegawainya terpaksa harus dirumahkan. Selain itu beberapa destinasi wisata terpaksa harus ditutup agar tidak membuka kesempatan masyarakat untuk bergerombol dan menimbulkan kerumunan massa. *Social distancing* juga tidak hanya merugikan masyarakat kecil namun juga para pengusaha dan pemilik modal besar. Bursa saham anjlok seketika dan nilai tukar rupiah terjun bebas bahkan sampai ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. Jika hal ini terus berlanjut menyebabkan adanya kemungkinan bangkrut serta para wirausaha terpaksa harus menutup usahanya, imbasnya kemudian adalah buruh-buruh perusahaan tersebut terkena PHK. Beberapa faktor tersebut dikhawatirkan akan menjadi penyebab terjadinya kembali krisis moneter sama seperti tahun 1998. Dalam perspektif ekonomi politik, permasalahan ini menandakan adanya *market failure* atau kegagalan pasar. Tentunya Pemerintah tidak boleh tinggal serta tidak mengambil tindakan apapun, Pemerintah perlu memberikan perhatian dan membuat kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian negara agar tidak terjadi kehancuran ekonomi. Pemerintah perlu memperbaiki distorsi yang ada di pasar, meskipun tidak harus sampai menggantikan fungsi mekanisme pasar itu sendiri. Karena Indonesia menerapkan sistem ekonomi neo-klasik, maka

seharusnya pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk menyelamatkan perekonomian. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran kabinet untuk fokus pada mitigasi dampak pelemahan ekonomi global ditengah wabah Virus corona terhadap pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional. Kementrian dan lembaga terkait diperintahkan untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat menjadi stimulus sekaligus untuk merespons perubahan situasi. Untuk melampaui pandemic global COVID-19 ini, selain fokus pada pencegahan dan penyebaran virus corona beserta dengan pengobatannya, perlu juga mengobati lemahnya produktivitas di berbagai sektor ekonomi sebagai langkah preventif agar tidak terjadi krisis ekonomi yang bisa menjalar pada krisis politik dan krisis sosial. Stimulus ekonomi sudah saatnya diberikan, dengan pertimbangan kepada sector-sektor yang lebih memperkuat perekonomian rakyat. Selain itu juga perlu melaksanakan reformasi ekonomi dimana yang paling mendasar adalah reforma agraria apalagi jika kemudian dilanjutkan dengan menghidupkan dan mengembangkan koperasi sebagai bentuk perekonomian yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat maupun ekonomi nasional.

REFERENSI

- Ritonga, M. R., Solikhun, Lubis, M. R., & Windarto, A. P. (2018). Sistem Pakar Diagnosa Gejala Awal Penyakit Akibat Virus Pada Anak Berbasis Mobile Dengan Forward Chaining. *Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan (InfoTekJar)*, 2(2), 140–145. <https://doi.org/10.30743/infotekjar.v2i2.298>
- Ruslin, I. T. (2012). Relasi Ekonomi-Politik Dalam Perspektif Dependencia. *Jurnal Wawasan Keislaman (Sulesana)*, 7(2), 114–126.
- <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/298656-ekonomi-masyarakat-tertekan-COVID-19-kemensos-salurkan-bantuan>
- <https://m.liputan6.com/news/read/4201341/headline-COVID-19-pandemi-global-bagaimana-protap-dan-koordinasi-pusat-daerah-di-indonesia>

ANALISIS PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF EKONOMI POLITIK MENGUNAKAN PENDEKATAN NEO KLASIK

Yeni Yuli Wulandari

COVID-19 merupakan virus yang tergolong sebagai virus yang berbahaya, Virus ini muncul pertama kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Menurut World Health Organization, dilansir dari CNBC Indonesia, COVID-19 adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia virus ini menyebabkan infeksi pernafasan seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Orang yang terjangkit Virus COVID-19 akan memiliki gejala awal seperti demam, mudah lelah, batuk kering, dan sakit tenggorokkan. Virus ini dapat menyebar dengan cepat melalui udara, batuk serta melakukan kontak langsung dengan penderita. Penyebaran COVID-19 tergolong sangat cepat, dengan waktu yang cukup singkat, COVID-19 merebak ke berbagai Negara termasuk Indonesia.

Penyebaran COVID-19 di Indonesia berawal dari salah seorang warga Depok yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia serta berstatus sebagai penderita COVID-19 ke-24 di Malaysia, Secara tidak sadar penderita COVID-19 tersebut juga telah menyebarkan virus kepada ibu-nya dengan melakukan kontak secara langsung. Hal ini menyebabkan munculnya kasus pertama virus COVID-19 di Indonesia yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus ini dikenal sebagai kasus 01 dan kasus 02 yang menjadi awal dari munculnya kekhawatiran dan

kewaspadaan baik dari pemerintah ataupun masyarakat Indonesia. Pemerintah mengambil langkah untuk segera mengisolasi kedua penderita COVID-19 dan menelusuri siapa saja yang telah melakukan kontak langsung dengan dua orang penderita tersebut. Agar selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan secara berkelanjutan guna mengantisipasi penularan yang lebih luas di masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan beberapa kasus baru pasien positif COVID-19 dan mengalami lonjakan cukup tinggi, dari 2 kasus menjadi 14 kasus pada tanggal 4 Maret 2020. artinya terdapat kenaikan sebanyak 12 kasus dalam kurun waktu 2 hari. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan dari hari ke hari, sampai tanggal 16 Maret 2020 diketahui terdapat 134 yang dinyatakan positif terpapar virus COVID-19 dan 8 orang dinyatakan sembuh serta 5 orang dinyatakan meninggal dunia. Hal ini yang membuat masyarakat semakin khawatir, sehingga untuk meredam kekhawatiran masyarakat Indonesia, Pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan kebijakan *Sosial Distancing*.

Sosial Distancing merupakan pembatasan sosial yang dilakukan dengan mengendalikan serangkaian aktivitas untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular COVID-19. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kebijakan untuk beraktivitas produktif di rumah perlu dilakukan untuk menekan penyebaran virus COVID-19, baik itu aktivitas bekerja, belajar, dan beribadah di rumah untuk dilakukan di dalam rumah. Sebab dengan adanya kerumunan dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah penyebaran atau meluasnya rantai hidup virus COVID-19. Adanya kebijakan tersebut tentu memberikan dampak positif maupun negative bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah dapat menghindari penyebaran virus COVID-19, sementara dampak negatifnya adalah berbagai sektor produktivitas

terhambat sehingga mengakibatkan jatuhnya perekonomian dan atau berhentinya produktivitas ekonomi.

Kebijakan mengenai *sosial distancing* tersebut menyebabkan beberapa sumber mata pencarian masyarakat menjadi terganggu, sehingga mempengaruhi perekonomian masyarakat. Hal ini yang membuat beberapa masyarakat masih tidak mematuhi kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, terutama pada masyarakat kelas menengah kebawah dan atau dapat disebut sebagai pekerja informal jika benar-benar mematuhi sosial distancing dengan tidak keluar rumah maka mereka tidak akan memiliki pendapatan sepeserpun. Beberapa contoh bentuk kerugian ekonomi masyarakat adalah kerugian yang dialami oleh sopir angkot dan ojek online (ojol) seperti yang dilansir dalam Katadata oleh Alike (2020), bahwa sopir angkutan kota (angkot) dan pengemudi ojek yang mengalami dampak cukup parah. Dengan perhitungan berdasarkan skenario sedang, sopir angkot dan pengemudi ojek di Sumatera Utara yang paling terdampak pandemi corona. Karena mengalami penurunan pendapatan sebesar 44%. Selain itu, pendapatan pedagang turun drastis akibat pandemi corona. Berdasarkan perhitungannya, penurunan terdalam akan dirasakan pedagang di Kalimantan Utara yakni 36%. Pendapatan petani dan nelayan juga bakal menurun akibat pandemi corona. Berdasarkan perhitungan dampak COVID-19 level sedang, pendapatan petani dan nelayan di Kalimantan Barat diprediksi anjlok 34%. Kemudian, buruh di Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan pendapatannya turun paling dalam akibat virus corona dengan skenario sedang, penurunannya sekitar 25% dan hanya mampu bertahan hingga Juni-September. Beberapa perhitungan terkait dampak yang telah terjadi membuat Presidien Indonesia melihat dari berbagai aspek dan pemerintah tidak dapat memberanikan diri untuk mengambil kebijakan yang lebih ekstrim seperti

kebijakan *Lockdown* yang diambil oleh Negara-negara lain untuk memutus rantai hidup virus ini. Sebab, dengan mengambil langkah *Lockdown* tentunya akan memberikan dampak lebih buruk bagi ekonomi dibandingkan kebijakan yang sekarang ini.

Maka analisis prespektif ekonomi politik jika dilihat menggunakan pendekatan neo-klasik dapat digambarkan untuk mengatasi kelemahan dan ketidaksempurnaan, seharusnya pemerintah harus campur tangan dalam urusan ekonomi masyarakat Indonesia. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dari segi ekonomi politik untuk mengatasi berbagai kelemahan karena adanya virus COVID-19 dengan memangkas APBN dan APBD yang bukan belanja prioritas, pengalokasian ulang anggaran ke setiap daerah untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dengan memastikan daya beli masyarakat dalam keadaan aman, pemerintah menunda berbagai kegiatan seperti pilkada serentak, dan dihapuskannya Ujian Nasional bagi SD hingga SMA, serta Pemerintah lebih mempertegas dan menggencarkan sosialisasi kebijakan *Sosial Distancing*. Kebijakan ini dianggap paling efektif dalam penanganan COVID-19 di Indonesia daripada memberlakukan sistem *Lockdown*. Sebab jika pemerintah mengambil langkah untuk *Lockdown*, maka akan terjadi kemungkinan pelemahan di sektor lain.

REFERENSI

- Alika, R. (2020). Jokowi hitung dampak ekonomi Coron, Sopir angkot dan Ojek Online berat. Retrieved from Katadata website: <https://katadata.co.id/berita/2020/03/24/jokowi-hitung-dampak-ekonomi-corona-sopir-angkot-ojek-paling-berat>
- Budiansyah, A. (2020). Apa itu Virus Corona dan Cirinya menurut Situs WHO. Retrieved from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who>
- Kurniawan, S. (2020). Jokowi : Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah dari rumah perlu digencarkan. Retrieved from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan>
- Taher, A. P. (2020). Riwayat Perjalanan Pasien Positif Corona COVID-19 di Indonesia. Retrieved from Tirto ID website: <https://tirto.id/riwayat-perjalanan-pasien-positif-corona-COVID-19-di-indonesia-eCn3>

COVID-19: KAPITALISME DI BALIK PANDEMI?

Diana Fera Sari



Gambar oleh CakraJingga

Awal tahun 2020 menjadi awal tahun yang berat bagi negara-negara di berbagai belahan dunia. Adanya ketidakpastian global yang diwarnai perang dagang menimbulkan ketegangan geopolitik dan terhambatnya kapital sehingga berdampak pada lesunya perekonomian global. Kondisi tersebut kemudian diperparah dengan merebaknya virus corona atau *coronavirus disease* (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) pada 11 Maret 2020 dengan jumlah negara terinfeksi mencapai 114 negara (katadata.co.id). COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan khususnya paru-paru akibat adanya infeksi virus SARS-CoV-2. COVID-19 adalah singkatan dari corona (Co), virus (Vi), dan disease (D), sedangkan angka 19 menunjukkan tahun 2019 dimana menjadi tahun pertama virus tersebut diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019.

Jumlah kasus Virus Corona diberbagai negara mengalami peningkatan setiap harinya dengan kasus terkonfirmasi mencapai 465.915 dan jumlah kematian mencapai 21.031 kasus (COVID19.go.id). Saat ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang juga terpapar Virus Corona. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (COVID19.go.id) per-tanggal 27 Maret 2020 pukul 12.00 WIB terdapat 1.046 orang dinyatakan positif dengan rincian 46 orang sembuh dan 87

orang dinyatakan meninggal dunia yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Menanggapi kasus virus corona yang mulai merebak di berbagai negara, alih-alih mengantisipasi pencegahan Virus Corona, Pemerintah Indonesia justru bersikap sebaliknya. Presiden Jokowi melalui akun twitternya pada tanggal 17 Februari 2020, menuliskan untuk mengantisipasi dampak virus corona terhadap sektor pariwisata di Indonesia, Pemerintah Indonesia akan memberikan insentif bagi para wisatawan, termasuk travel bironya. Hal tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara kepentingan *profit* dan kepentingan kesehatan masyarakat di Indonesia. Pemerintah berpikir bahwasanya apabila arus mobilisasi manusia dari satu negara ke negara lain terhenti maka arus modal juga akan ikut berhenti. Pemerintah Indonesia juga membatasi informasi terkait jumlah data orang yang terinfeksi virus corona di Indonesia, karena mengkhawatirkan informasi tersebut dapat mengganggu arus investasi kapital bagi Indonesia, sehingga pemerintah melakukan berbagai cara untuk menciptakan ketenangan di antara investor meskipun dengan mengabaikan situasi yang ada. Sebaliknya, masyarakat Indonesia justru takut akan penyebaran virus corona yang dapat mengancam nyawa mereka.

COVID-19 menjadi salah satu permasalahan kesehatan serius yang dapat menyebabkan ketakutan sehingga mempengaruhi dinamika politik, ekonomi, maupun sosial bagi masyarakat di dunia. Ketakutan-ketakutan yang timbul akibat adanya virus tersebut dapat menyebabkan tindakan-tindakan yang *irrational*. Roosevelt tahun 1932 pernah mengatakan satu-satunya hal yang harus ditakutkan adalah rasa takut itu sendiri. Rasa takut yang berlebihan dapat membuat seseorang bereaksi secara berlebihan pula. Setelah terdapat pengumuman resmi dari Presiden Jokowi terkait adanya

kasus COVID-19 di Indonesia, beberapa masyarakat Indonesia khususnya yang memiliki *privilege* mulai mencari dan menimbun berbagai barang pokok maupun barang yang dianggap dapat menangkal virus corona, seperti; *hand-sanitizer*, *anti septic*, masker, jahe, kunyit, dan lain-lain dengan jumlah yang berlebih yang dapat disebut dengan *panic buying*.

Privilege di sini dapat diartikan sebagai keunggulan atau kemampuan yang dimiliki oleh segelintir masyarakat contohnya seperti kekayaan, dengan kekayaan tersebut orang-orang yang dinilai mampu dapat membeli barang-barang yang mereka butuhkan sebanyak mungkin. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan atas barang-barang yang dibutuhkan semakin meningkat sedangkan ketersediaan barang menjadi langka. Dampaknya harga barangpun melonjak bahkan berkali-kali lipat dari harga normal. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan sebagian orang sebagai peluang untuk menjual barang dengan harga yang fantastis meskipun dalam situasi krisis. Hukum kapitalisme di pasar bebas telah membuat sebagian orang memiliki 'modal' yang begitu besar, sementara di sisi lain banyak orang yang justru kesulitan untuk mencari atau mendapatkannya. Lonjakan harga merupakan hal yang tidak terbantahkan selama roda perekonomian masih dijalankan dengan metode pasar bebas yang berorientasi *profit*. Hal tersebut berdampak pada masyarakat menengah ke bawah, di tengah pandemi corona mereka justru kesulitan memperoleh barang-barang tersebut, karena kelangkaan dan harga yang tidak rasional.

Masyarakat yang memiliki *privilege* tentu dapat melakukan aktivitas atau pekerjaannya dari rumah untuk meminimalisir penyebaran corona. Namun, tidak semua masyarakat Indonesia dapat melakukan *work from home*, banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya dari hasil pendapatan harian, seperti pedagang asongan, pedagang keliling,

pedagang kecil, buruh, karyawan, atau rakyat pekerja. Mereka adalah orang-orang yang paling rawan terjangkit virus karena harus berinteraksi dengan orang lain secara terus menerus dalam skala besar, menaiki kendaraan umum untuk pergi bekerja, ditambah minimnya perlengkapan kesehatan yang tersedia. Mereka terus bekerja dan menghadapi resiko terjangkit virus. Sementara para pemilik modal enggan mengurangi keuntungan untuk melengkapi kantor atau pabriknya dengan perlengkapan kesehatan yang cukup untuk mencegah penularan virus corona.

Masyarakat kalangan atas bahkan para pejabat publik dapat dengan



mudah melakukan tes COVID-19. Sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah justru merasa kebingungan untuk melakukan tes COVID-19, mereka mempertimbangkan biaya yang cukup mahal dengan beban hidup yang mereka tanggung. Belum lagi resiko tertular pada saat mengantri panjang di rumah sakit

karena berbelitnya arus administrasi yang harus dilalui. Dilansir dari (kompas.tv) sebanyak 575 anggota DPR RI ditambah dengan anggota keluarganya, yang diperkirakan mencapai dua ribu orang, dalam waktu dekat akan menjalani tes COVID-19. Hal tersebut jelas menuai kontra dari berbagai kalangan, karena masih banyak masyarakat yang lebih membutuhkan, khususnya bagi para tenaga medis yang selama ini justru berinteraksi secara langsung dengan pasien-pasien positif virus corona, maupun para pekerja atau karyawan yang masih terus berinteraksi dengan orang lain dalam skala besar, sehingga lebih rentan terhadap paparan virus corona.

Dalam sistem kapitalis, harga merupakan alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya (Agustiati, 2009). Dari sini dapat dipahami bahwasanya, kaum elite dan pejabat publik tentu dapat memanfaatkan *previlegenya* untuk dapat dengan bebas membeli barang sebanyak yang mereka inginkan, melakukan tes COVID-19 dengan berapapun biayanya, karena mereka memiliki uang atau modal yang besar. Mereka yang berkuasa dan kaya raya dapat meminimalisir segala resiko penyebaran virus corona, sedangkan para masyarakat kelas menengah ke bawah, jangankan untuk melakukan tes COVID-19, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga sulit dimana harga barang melambung tinggi dan barang-barang tersebut mulai langka, selain itu mereka juga sulit mendapatkan perlengkapan kesehatan yang memadai saat bekerja ditengah kerentanan penyebaran virus corona ini. Sangat disayangkan dalam menghadapi krisis pandemi corona, pemerintah Indonesia justru menggelontorkan uang untuk kepentingan arus modal (*profit*) dibanding mendanai secara penuh layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, yang rentan akan virus corona.

REFERENSI

- Agustiati, Agustiati. (2009). Sistem Ekonomi Kapitalisme. *Jurnal Ilmiah Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako*, 1(2) 152-166.
- BNPB. (27 Maret 2020). Infografis COVID-19. (<https://www.COVID19.go.id>). Diakses pada 27 Maret 2020.
- Katadata.co.id. (16 Maret 2020). *COVID-19, dari Wabah Jadi Pandemi*. (<https://katadata.co.id/infografik/2020/03/16/COVID-19-dari-wabah-jadi-pandemi>). Diakses pada 27 Maret 2020.
- Kompas.tv. (24 Maret 2020). *Rapid Test Corona Gratis untuk Anggota DPR dan Keluarga Menjadi Polemik*. (<https://www.kompas.tv/article/72921/rapid-test-corona-gratis-untuk-anggota-dpr-dan-keluarga-menjadi-polemik>). Diakses pada 27 Maret 2020.
- Wikipedia.org. (23 Maret 2020). *SARS-CoV-2: Galur Virus dalam Famili Coronaviridae*. (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2>). Diakses pada 27 Maret 2020.

LONJAKAN PASIEN VIRUS CORONA DRASTIS, PERLUKAH *LOCKDOWN*? PEMERINTAH JANGAN MENYESAL

Khusnul Prasetyo

Jumlah pasien positif terinfeksi virus corona (COVID-19) di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 hingga hari Jumat, 27 Maret 2020 bertambah menjadi 1046 orang. Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 87 orang dan sembuh 46 orang. Jumlah kematian ini menjadikan Indonesia mendapat predikat sebagai negara *death-rate* tertinggi di dunia. Di belahan dunia lain, tepatnya di Italia, jumlah kematian akibat COVID-19 kini sudah melampaui China. Jika dilihat trend kenaikannya, antara Italia dengan Indonesia perlu diwaspadai. Data yang dirilis oleh *Ministero della Salute* dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada hari pertama, Indonesia dan Italia memiliki 2 pasien positif COVID-19, hari ke -10 bertambah menjadi 3 kasus pasien positif COVID-19 di Italia, sedangkan di Indonesia telah mencapai 34 kasus pasien positif COVID-19. Pada hari ke -20, Italia masih bertahan dengan 3 kasus pasien positif COVID-19, namun di Indonesia melonjak tajam menjadi 450 kasus pasien positif COVID-19.

Mengapa kasus COVID-19 di Italia semakin merebak dan memakan banyak korban jiwa beberapa bulan terakhir ini?. Awalnya Pemerintah Italia teledor karena terlalu menganggap remeh COVID-19. Ditambah sikap permisif (terbuka) masyarakat semakin memperparah keadaan, sehingga banyak menyebabkan para lansia terkena COVID-19. Pada saat

pandemik COVID-19 semakin parah, Pemerintah baru mengambil langkah serius yakni melakukan *Lockdown*. Namun implementasinya dirasa belum optimal. Sun Shuopeng, *Executive Chairman Red Cross Society of China* menilai bahwa belum optimalnya *Lockdown* adalah karena transportasi publik masih beroperasi, masyarakat masih berkeliaran di luar rumah. Bahkan sebagian masih ada yang makan dan pesta di hotel, mirisnya mereka banyak yang tidak menggunakan masker.

Reaksi awal Italia terhadap COVID-19 mirip dengan Indonesia. Pemerintah dan sebagian masyarakat masih menganggap enteng virus ini. Awalnya Pemerintah Indonesia seakan menutup-nutupi fakta tentang COVID-19 di Indonesia. Alhasil, masyarakat tidak memiliki kesiapan ataupun pemahaman terhadap Virus Corona. Menteri Kesehatan Terawan, sebelumnya juga terlalu angkuh dan sibuk menjelaskan bahwa Virus Corona tak akan masuk ke Indonesia, menyalahkan masyarakat karena mencari masker dan mengatakan bahwa Corona “bukan sesuatu yang menakutkan” serta “bisa sembuh sendiri”. Selain itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga disorot dan mendapat kritikan oleh netizen terkait pengangkatan 188 WNI yang menjadi Anah Buah Kapal *World Dream* sebagai Duta Imunitas Corona. Di tengah mewabahnya COVID-19, pemerintah juga terlalu menyibukkan diri dengan menggelontorkan Rp 72 miliar untuk jasa influencer demi meningkatkan sektor pariwisata, kebijakan tersebut menuai kritikan dari Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio.

Pemerintah sedari awal cenderung kurang persiapan dalam menanggapi COVID-19. Terlihat dari terjadi kelangkaan stok masker di pasaran. Ironisnya, di tengah kelangkaan pasokan masker di berbagai daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor masker Indonesia melonjak hingga 3.385,43 persen sepanjang Februari 2020. Nilai ekspor

masker meningkat dari 2,1 juta dolar AS (Januari 2020) menjadi 74,7 juta dolar AS (pada Februari 2020). Pemerintah nampaknya memang terlambat menyadari bahwa pasokan masker dalam negeri mulai terbatas. Bahkan, saat melakukan sidak ke apotek Kimia Farma, Menteri BUMN Erick Thohir, mengklaim ketersediaan masker cukup. Sangat disayangkan sikap pemerintah yang berpangku tangan sejak awal tahun dan tak memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri. Permintaan larangan ekspor masker baru saja disampaikan pada 4 Maret 2020 oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Itu pun hanya sebatas himbauan, dan di Indonesia masih minim Alat Pelindung Diri (APD) bagi para tenaga medis.

Media Inggris *Daily Mail* juga menyoroti bahwa pemerintah Indonesia hanya melakukan sekitar 2000 tes COVID-19 dari 270 juta jiwa yang mendiami negara ini. Para peneliti percaya jika Indonesia melakukan pengujian dengan lebih luas, hasilnya jutaan orang diprediksi akan terinfeksi virus corona dalam beberapa bulan mendatang. Profesor matematika terapan di University of Essex di Inggris memperkirakan 50 persen penduduk Jakarta akan terinfeksi dalam 50 hari sejak kasus pertama dikonfirmasi pada 2 Maret lalu.

Profesor Susanto menggunakan Jakarta sebagai sampel dengan populasi sekitar 10 juta orang. Pada puncaknya, virus ini dapat menginfeksi 50 persen populasi. Prediksi itu bisa lebih parah jika pemerintah tak memberlakukan *Lockdown*. Sementara itu, peneliti Iqbal Ridzi Elyazar dari Eijkman-Oxford Clinical Research Unit (EOCRU) mengatakan sekitar 70.000 warga Indonesia diprediksi akan terinfeksi virus pada akhir April, mungkin hal tersebut terdengar menakutkan tetapi itulah yang akan terjadi apabila tidak ditangani dengan tepat.

Berbicara *Lockdown*, telah banyak disuarakan dari awal oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Pemerintah Daerah (Pemda), influencer, politisi,

bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kebijakan Pemerintah seperti *social distancing* dan meniadakan keramaian itu masih terbukti kurang efektif dan optimal. Bahkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam portal berita Times Indonesia menyayangkan masyarakat yang belum mengindahkan himbauan untuk melakukan *social distancing*.

Lockdown pada dasarnya merupakan kewenangan pusat, sampai saat ini Pemerintah tidak memilih *Lockdown* dikarenakan pertimbangan ekonomi dan menghindari kepanikan masal, dimana pemerintah pusat mengedepankan penyelamatan ekonomi nasional sekaligus mempertimbangan keberlangsungan usaha kecil menengah dan pekerja sektor informal yang hanya bisa menghasilkan uang ketika beraktivitas secara normal. Namun, jika berkaca dari Italia, kita perlu meningkatkan kewaspadaan. Karena jika tidak hati-hati dan waspada, kasus COVID-19 di Indonesia bisa lebih parah dari Italia. Kini virus corona semakin menyebar luas. Kepanikan semakin terasa dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Sehingga opsi *Lockdown* menjadi salah satu pilihan yang tidak dapat ditunda lagi. Untuk mengantisipasi kekhawatiran ekonomi, pemerintah dapat mengeluarkan paket kebijakan darurat seperti subsidi kepada rakyatnya meskipun dapat mencekik APBN. Namun setidaknya virus ini bisa ditekan dengan adanya opsi *Lockdown* dan mampu diatasi secara bertahap.

SKEPTISME MASYARAKAT DI TENGAH PANDEMI GLOBAL : “PEMERINTAH BISA APA?”

Zuhriatu Mahmudah

Pada tanggal 12 Maret 2020, WHO (World Health Organization) Menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Corona Virus pertama kali ditemukan di Wuhan-China, dengan cepat virus tersebut menyebar ke berbagai belahan dunia. Penyebaran virus ini tergolong sangat cepat karena COVID-19 akan tetap menyebar dan menular meskipun tanpa adanya kontak langsung dengan *Carrier* (orang yang terinfeksi COVID-19). Ekonomi China melumpuh karena banyak perusahaan yang ditutup, warga harus melakukan isolasi diri untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Banyak video yang diunggah melalui media sosial, video tersebut menampilkan betapa menakutkannya virus ini, sehingga menyebabkan para dokter stress karena harus bekerja dengan maksimal untuk melayani pasien yang jumlahnya terus meningkat setiap harinya. Minimnya fasilitas rumah sakit serta kurangnya ruangan khusus bagi pasien COVID-19 menyebabkan banyak pasien yang tidak tertolong. Namun masalah tersebut dapat diatasi oleh pemerintah China, dalam kurun waktu 10 hari, Pemerintah China berhasil membangun rumah sakit khusus pasien positif COVID-19.

Sementara Pemerintah Indonesia pada awalnya menganggap remeh virus COVID-19 bahkan Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan menyangkal tentang hasil riset dari peneliti Harvard yang memprediksi bahwa Virus Corona telah masuk ke Indonesia. Justru pemerintah menganggarkan 72 miliar untuk mendanai influencer dalam

paket insentif pariwisata untuk mempromosikan pariwisata Indonesia serta menangkal dampak negative Virus Corona. Tindakan pemerintah ini dinilai cukup lalai dan menambah deret panjang kegagalan pemerintah dalam penanganan penyebaran Virus Corona. Hingga akhirnya, pada awal bulan Maret digegerkan dengan adanya 2 orang yang dinyatakan positif terjangkit COVID-19 di Indonesia. Tentunya hal ini berhasil menggemparkan masyarakat dan mulai berbagai macam kritik yang mengalir deras ditujukan kepada Pemerintah Indonesia karena adanya persebaran Virus Corona. Akibatnya peristiwa *panic buying* melanda masyarakat, mereka memborong seluruh kebutuhan pokok untuk mengantisipasi penyebaran virus, namun pemerintah masih menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Pemerintah selanjutnya menetapkan beberapa protokoler untuk menangani pandemi ini, salah satunya dengan membentuk satgas dan memberikan akses informasi data terkait jumlah masyarakat yang dinyatakan positif virus corona. Kebijakan tersebut memunculkan banyak spekulatif dari berbagai kalangan masyarakat. Pemerintah dinilai kurang transparan dalam memberikan informasi tentang tempat penyebaran virus corona. Bahkan seringkali terjadi tumpang tindih dengan kepala daerah yang memberikan informasi tanpa wewenang dari pemerintah pusat.

Masyarakat terus mendesak pemerintah agar lebih terbuka kepada masyarakat. Namun, Pemerintah masih bersikeras untuk menyembunyikan data pasien dan tidak segera mengeluarkan peta wilayah persebaran COVID-19. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah informasi terkait tempat yang pernah dikunjungi atau pasien telah melakukan kontak sosial dengan siapa saja, sehingga masyarakat bisa melakukan tindakan preventif, seperti tidak mengunjungi tempat yang telah ditetapkan sebagai zona merah. Melihat situasi semakin memanas

dan angka kematian yang terus meningkat, membuat pemerintah daerah mengambil sikap untuk turun tangan secara langsung dalam menangani pandemi COVID-19.

Apabila dikaji lebih lanjut, perhitungan data pasien lebih efektif dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengatur wilayahnya melalui sistem desentralisasi yang diberlakukan. Perhitungan cepat yang dilakukan di daerah akan memberikan informasi secara cepat kepada Pemerintah Pusat, selain itu wewenang pemerintah pusat hanya mengawasi selagi memberikan opsi kebijakan lain untuk mengatasi permasalahan yang muncul, bukan ditangani sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat. Pertanyaan besarnya yang muncul, Apakah pemerintah daerah terlalu cepat mengambil tindakan atau pemerintah pusat yang dianggap tidak mampu dalam menangani Virus Corona?

Pada tanggal 27 Maret 2020, kasus pasien positif Corona mencapai angka 1046, dengan kalkulasi sembuh 46 pasien dan 87 pasien meninggal dunia. Indonesia memiliki angka resiko kematian tertinggi di dunia dan sangat lamban dalam Penanganan COVID-19. Virus Corona tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan tetapi juga mengakibatkan kegagalan pasar. Kapitalisme dalam pandemic ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti terjadinya kelangkaan masker dan handsanitizer sehingga membuat harga melambung tinggi, dampaknya masyarakat kecil tidak mampu membeli alat kesehatan tersebut. Pemerintah gagal dalam mengintervensi masyarakat pasar, baiknya perlu melakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang mampu meminimalisir melambungnya harga masker dan handsanitizer sehingga dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Masyarakat miskin juga memerlukan

fasilitas kesehatan, bukan hanya para teknokrat yang memiliki kekayaan lebih.

COVID-19 sangat rawan akan kepentingan politik, dengan situasi yang terus memanas, kubu oposisi dapat dengan mudah menciptakan opini publik untuk meruntuhkan kredibilitas pemerintah, mencari dukungan untuk membombardir dengan tujuan agar masyarakat skeptis terhadap segala kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pada kenyataannya, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dengan adanya pandemi COVID-19 ini terus mengalami penurunan. Pemerintah tidak mampu berbuat banyak dan terus disalahkan selama jumlah korban COVID-19 terus bertambah. Ancaman krisis ekonomi, kesejahteraan dan keadilan sosial harus dapat diatasi oleh pemerintah, agar kembali mendapatkan kepercayaan rakyat. Permasalahan ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang paling berperan, justru kerjasama harus dibangun antara pemerintah dan masyarakat, keduanya harus berkomitmen untuk bangkit melawan pandemi. Kekeliruan pemerintah patut untuk disahihkan, namun tidak saatnya untuk bertanya kembali “pemerintah bisa apa?”, namun komitmen yang harus masyarakat miliki saat ini adalah “Kita bisa bantu apa kepada pemerintah”.

REFERENSI

<https://www.pinterpolitik.com/menyoal-kebijakan-jokowi-atasi-corona/>

<https://m.detik.com/news/berita/id-4894445/harvard-sebut-corona-seharusnya-sudah-masuk-ri-menkes-itu-menghina>

<https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/dana-rp72-miliar-buat-influencer-pemerintah-gagap-tangani-COVID-19-eBrD>

DAMPAK WABAH COVID-19 TERHADAP PEKERJA OJOL (OJEK ONLINE) DI KOTA PASURUAN

Desavanda Arya Putra

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh polemik dengan adanya berbagai fenomena, seperti adanya kebakaran di wilayah Australia, pembunuhan jendral Iran oleh Amerika, peluncuran rudal Iran ke pangkalan tentara Amerika yang di dalamnya juga terdapat perwakilan pasukan pertahanan dari beberapa Negara, Banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta wabah Virus yang ditemukan pertama kali di China tepatnya di kota Wuhan. Sebutan virus ini adalah Virus Corona atau COVID-19, di beberapa berita yang beredar menjelaskan bahwa virus ini berasal dari hewan kelelawar yang dijual di Negara China. Melansir dari laman resmi Unair, Prof. Soewarno menjelaskan bahwa sejumlah pakar berpendapat COVID-19 merupakan virus jenis baru, apabila diamati melalui mikroskop virus corona memiliki karakteristik seperti mahkota yang ditandai dengan spike protein di sekeliling permukaan virus. Jenis protein itulah yang berperan sebagai reseptor serta mempengaruhi proses infeksi pada manusia.

Dilansir dari berita Merdeka.com – Virus Corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Menurut *World Health Organization (WHO)* virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang dampaknya lebih parah dibanding *MERS-CoV* dan *SARS-CoV*, Virus Corona bersifat *zoonosis*, artinya Virus tersebut merupakan penyakit yang

dapat di tularkan antara hewan dan manusia sama seperti Rabies dan Malaria. begitupun dengan Virus *MERS* yang dapat di tularkan dari unta ke manusia. Virus Corona atau yang lebih dikenal dengan sebutan COVID-19 menjadi wabah di Negara China dan merebak ke berbagai Negara di Dunia, sehingga WHO menetapkan COVID-19 sebagai *pandemic global*. Dilansir dari berita Tempo.co, Sejarah menunjukkan wabah bisa mengubah peradaban dan meruntuhkan dinasti seperti wabah kematian hitam (Black Death) abad ke-14 dan kebangkitan Eropa Barat, wabah cacar di Amerika dan perubahan iklim, Demam kuning dan Revolusi Haiti melawan Prancis, wabah ternak dan perluasan penjajahan di Afrika, pagebluk dan kejatuhan dinasti Ming di China, menjelaskan bahwa wabah memiliki peranan besar terhadap tatanan politik maupun dinasti.

Sebagaimana telah diketahui bahwa negara China merupakan Negara dengan populasi terbesar saat ini, serta warga negara China tersebar ke sebagian negara di Dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kebergantung ekonomi dengan China. Beberapa bagian di bidang industri dan elektronik di ekspor dari negara tersebut, tidak sedikit warga negara china yang menetap di Indonesia. Meskipun Indonesia bukan negara pertama yang terpapar Virus Corona, bukan berarti Indonesia terlepas dari ancaman Virus COVID-19. Pada saat ini Indonesia juga terpapar penyebaran Virus Corona. Indonesia terdeteksi terkena dampak penyebaran Virus Corona pertama kali diketahui pada tanggal 2 Maret 2020.

Apabila beberapa Negara bagian eropa seperti italia, spanyol memilih sistem *Lockdown* yang ketat, lantas bagaimana langkah Pemerintah dalam menganani penyebaran Virus COVID -19 ? apakah Pemerintah Indonesia juga akan mengambil jalan *Lock Down* ? Kita

ketahui Negara Indonesia memiliki masyarakat yang masih di kategorikan kurang memahami sebuah analisis informasi, sehingga informasi yang di berikan kurang dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Penyebaran Virus COVID-19 di Indonesia sudah menjalar kebeberapa provinsi dan sudah terdapat korban jiwa. Pemerintah Indonesia mengklasifikasikan dalam 3 kategori tentang penanganan penyebaran Virus Corona. Kategori yang pertama adalah ODP (Orang Dalam Pemantauan), kedua PDP (Pasien Dalam Pengawasan), dan yang terakhir adalah Positive COVID-19. Pemerintahan Indonesia masih belum berani untuk mengambil tindakan *Lock Down*, akan tetapi Pemerintah hanya memberikan informasi serta himbuan terhadap warga Negara dalam mencegah penyebaran Virus COVID-19. Pemerintah juga memberikan himbuan agar setiap rumah makan dan berbagai tempat umum memberikan fasilitas Handsanitizer. Pemberian Fasilitas Handsanitizer juga diberikan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu kepolisian juga dilibatkan dalam menertibkan masyarakat yang masih melakukan kegiatan dan menimbulkan kerumunan massa, sehingga apabila terdapat titik kearamaian secara terpaksa akan dilakukan pembubaran, hal itu dilakukan demi menjaga keselamatan warga negaranya. Menteri Pendidikan juga memberikan keputusan agar proses belajar mengajar secara langsung di sekolah dan universitas dihentikan sementara waktu serta diganti dengan proses belajar mengajar secara online atau daring. Hal tersebut guna untuk meminimalisir penyebaran Virus Corona di Indonesia.

Meski berbagai upaya telah dilakukan namun tetap dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah agar kebijakan tersebut dapat berjalan maksimal. Dikeluarkan beberapa kebijakan seperti ini tentunya menjadi sebuah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut tentu memiliki dampak ke berbagai sektor, terutama dampak pada

sektor ekonomi. Himbauan untuk dilarangnya kegiatan yang melibatkan banyak orang, akan berdampak pada sektor produksi. Sektor Produksi akan mengalami penurunan dan kerugian yang cukup besar, karena kepercayaan pelanggan akan menurun terhadap sebuah produk yang di jual di pasaran diakibatkan fenomena COVID-19. Wirausahawan juga terpaksa harus menutup tempat usahanya demi keselamatan khalayak umum serta untuk menaati aturan yang berlaku. Apabila dikaji dari sudut konsumen, adanya himbauan dari pemerintah untuk “tetap dirumah”, secara tidak langsung merupakan himbauan bagi masyarakat agar mengurungkan keinginannya untuk keluar rumah apabila memang tidak terlalu penting. Hal tersebut juga berdampak pada keinginan para konsumen untuk tidak mengunjungi beberapa pusat perbelanjaan ataupun sebuah tempat produksi secara langsung. Fenomena tersebut dapat mengurangi aktivitas jual beli pasar di Indonesia, sehingga produktivitas pengeluaran rumah tangga akan menurun. Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada penyedia barang, namun juga penyedia layanan jasa.

Di Negara Indonesia terdapat suatu perusahaan yang dimana menyediakan sebuah layanan jasa. Perusahaan ini pertama kali di dirikan pada 13 Oktober 2010, pendirinya adalah Nadiem Makarim, Kevin Aluwi & Michaelangelo Moran. Perusahaan dengan basis Teknologi Informasi Transportasi ini merupakan sebuah inovasi dalam memberikan pelayanan yang tentunya dapat memudahkan manusia dalam memenuhi keinginannya. Perusahaan ini di beri nama GO-JEK yang di dirikan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa. GO-JEK merupakan aplikasi yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. GO-JEK juga telah tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia, terkecuali pada beberapa titik pedalaman.

Perusahaan ini memiliki kurang lebih 4 ribu pegawai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Para pekerja GO-JEK melakukan pekerjaannya dengan menggunakan aplikasi, sistem kerja aplikasi tersebut dapat mendeteksi tempat keramaian atau wilayah yang dapat memberikan peluang bagi para pekerja GO-JEK untuk mendapatkan penumpang atau masyarakat yang membutuhkan layanan jasa. Para pekerja GO-JEK harus melakukan kontak secara langsung dengan pelanggan. Ditengah merebaknya Virus COVID-19, Para pekerja GO-JEK setiap waktunya akan melakukan kontak dengan pengguna jasa yang berbeda. Dikarenakan hal tersebut, ada kemungkinan para pekerja GO-JEK dapat terpapar Virus Corona yang dibawa oleh konsumennya. GO-JEK merupakan pekerjaan yang sistem waktu kerjanya diatur secara individu, maka diperlukan manajemen waktu yang baik dalam melakukan pekerjaan tersebut. Para pekerja GO-JEK juga memiliki batas dan daya tahan tubuh yang berbeda antara satu dengan yang lain, maka diperlukan langkah preventif guna mencegah penyebaran Virus COVID-19.

Beberapa Narasumber berhasil ditemui untuk melakukan wawancara lebih lanjut. Nanda Arif Arya Putra berjenis kelamin laki – laki, berumur 28 tahun, dan belum berkeluarga. Merupakan salah satu pegawai GO-JEK yang menjadi sumber Informasi dari perwakilan perkumpulan pekerja GOJ-EK di Wilayah Kota Pasuruan. Narasumber mengatakan bahwa adanya fenomena COVID-19 sangat mempengaruhi pendapatan setiap harinya. Hal ini di karenakan banyaknya anak sekolah yang dihimbau untuk belajar dirumah, pegawai bekerja dari rumah serta muncul ketidakpercayaan kepada para pekerja GO-JEK. Meskipun tetap ada pendapatan namun pendapatan tersebut menurun dari hari biasanya, sehingga diperlukan kerja ekstra agar pendapatan bisa stabil. Narasumber lain bernama Dominggus Krisnando Dokubani pria asal Kota Pasuruan

dengan keturunan keluarga dari pulau Nusa Tenggara Barat juga memberikan sebuah informasi yang kurang lebih hampir sama dengan narasumber sebelumnya. Narasumber tersebut juga mengatakan bahwa pelanggan tidak sebanyak sebelum adanya fenomena COVID-19, sebagian besar konsumen atau pengguna jasa juga sering menanyakan perihal status kesehatannya. Narasumber ketiga bernama Sofya Mauludy pria asal Kota Pasuruan, memiliki umur 22 tahun, menjelaskan bahwa ada perasawaan was-was selama melakukan aktivitas pekerjaan, hal ini dikarenakan dia harus melakukan kontak secara langsung dengan para konsumen, belum lagi adanya perbincangan isu antar pekerja tentang ketakutan apabila salah satu pekerja GO-JEK terjangkit virus COVID-19, tentu hal tersebut membuat kepercayaan konsumen menurun, sehingga berdampak pada pendapatannya.

Tentu tidak bisa di pungkiri bahwa pekerjaan sebagai GO- JEK merupakan pekerjaan yang sangat rentan terhadap virus COVID-19. Apabila di lihat dari manajemen waktu dan lokasi kerja, hal ini tentu akan mengakibatkan tingkat Immunitas atau kekebalan tubuh melemah. Melakukan kontak secara langsung dengan konsumen atau antar pekerja dapat mempengaruhi persebaran Virus COVID-19. Fenomena COVID-19 sangat mempengaruhi kinerja pekerja dan pendapatannya para pekerja GO-JEK. Para pekerja GO-JEK harus melakukan hidup sehat guna mencegah dari paparan Virus COVID-19. Apabila para pekerja GO-JEK berhenti beroperasi maka mereka tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak adanya pendapatan. Menjalankan pola hidup bersih dan sehat seperti menggunakan masker, sarung tangan serta Handsanitizer merupakan salah satu cara agar para pekerja GO-JEK dapat meminimalisir penyebaran COVID-19.

COVID-19 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK

Adhitya Yudha Satria

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi korban penyebaran COVID-19, hingga 26 Maret 2020 sudah tercatat 893 orang positif COVID-19. Dalam upaya menekan penyebarannya, pemerintah Indonesia memberlakukan *social distancing* atau menjaga jarak dalam melakukan aktivitas sosial. *Social distancing* dijadikan sebuah solusi agar masyarakat melakukan aktivitas didalam rumah, istilah ini dikenal juga *Work From Home*. Pemerintah juga menghimbau Masyarakat untuk menghindari pertemuan massal, menjaga jarak *person to person*, belajar serta beribadah di rumah. COVID-19 saat ini sudah menjadi masalah publik karena dampak yang ditimbulkan sangat terasa, terutama di bidang ekonomi. Adapun dampaknya adalah :

1. Adanya kenaikan harga yang tidak normal terhadap barang-barang atau segala kebutuhan yang berkaitan dengan COVID-19 (masker, *hadsanitizer*, Alat Perlindungan Diri (APD), Disinfektan, dsb.
2. Berkurangnya pendapatan para pedagang kaki lima maupun para pekerja lapangan karena terkena dampak secara tidak langsung dari kebijakan *social distancing* dan *work from home*.
3. Penerimaan pajak sektor perdagangan mengalami penurunan.
4. Produktivitas sektor industri menurun bahkan berhenti berproduksi sementara.
5. Menurunnya laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga karena produktivitas yang menurun dan terjadi kelangkaan barang yang juga disebabkan karena *panic buying*.

Social distancing tetap diterapkan meskipun ini menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat golongan menengah kebawah terutama para pekerja informal menjadi salah satu pihak yang menolak adanya *social distancing*. Sikap tersebut muncul karena pendapatan mereka setiap harinya akan berkurang secara drastis. Meskipun terdapat tekanan sosial dari kalangan masyarakat tertentu, kebijakan tersebut tetap di implementasikan, namun konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari daya tawar atau kekuatan politik yang ditimbulkan lebih kecil daripada kebijakan *Lockdown*.

Jika fenomena diatas dianalisis menggunakan pendekatan neo-klasik dapat diketahui bahwa kebijakan *social distancing* yang diterapkan pemerintah akan berdampak besar bagi perekonomian. Turunnya produktivitas dan berhenti produksi beberapa pabrik yang mengakibatkan kenaikan harga yang cukup signifikan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum atau pengusaha yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan memanfaatkan situasi *panic buying* yang dialami oleh masyarakat. Seiring dengan meningkatnya permintaan alat kesehatan, oknum-oknum ini memanfaatkan situasi untuk menjadi *supplier* dalam memasok masker, handsanitizer, dan Alat Pelindung Diri sehingga harga yang ditawarkan cukup tinggi. Pemerintah belum bisa mengendalikan atau mengatasi permasalahan tersebut, sehingga masyarakat atau pengusaha memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga seiring dengan meningkatnya permintaan barang. Hal ini mengakibatkan masyarakat golongan menengah kebawah tidak mampu membeli perlengkapan kesehatan guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Terdapat kegagalan pasar yang disebabkan karena pemerintah tidak mampu mengintervensi dan mengendalikan harga alat kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19, padahal fungsi adanya negara adalah

untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut sesuai dengan pendekatan neo-klasik dimana pemerintah berperan penting untuk mengatasi kegagalan pasar. Namun pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah tersebut dengan beberapa langkah yang akan diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Mengurangi pembatasan impor terutama pada impor bahan baku agar tidak terkendala di dalam impornya
2. Impor alat tes massal, masker, handsanitizer dan disinfektan bebas dari pajak

Dilain sisi, virus Corona tidak hanya memberikan dampak negatif bagi Indonesia, baik dibidang ekonomi atau kesehatan, namun juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru. Selain itu, peluang untuk memperkuat ekonomi dalam negeri dapat terealisasi karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada menarik keuntungan luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi, agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang melemah.

Jika ditinjau dari aspek politik, terdapat kemungkinan kepercayaan masyarakat akan menurun apabila pemerintah Indonesia gagal melindungi warga negaranya. Bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa rakyat tidak akan memilih kembali politisi yang gagal dalam melaksanakan tanggung jawab penanganan COVID-19 pada pemilu mendatang. Dalam konteks politik, COVID-19 secara alami atau "by nature" dapat menguji tingkat kepercayaan publik terhadap pemangku kekuasaan. Keterbukaan dan sikap responsif pemerintah akan membantu publik untuk berhenti berspekulasi di tengah keadaan yang dinamis tersebut. Efektivitas pemerintah dalam merespon ancaman pandemi ini akan menunjukkan

sejauh mana simpati publik pada kekuasaan yang sedang berjalan. Hal tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan kinerja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penanganan dan pencegahan penularan penyakit agar tidak semakin meluas dalam konteks geografis maupun dampak multidimensi (ekonomi, politik, sosial). Kekuasaan akan semakin diguncang secara alamiah, legitimasinya mulai dipertanyakan, dan masih terdapat isu-isu politik yang nantinya semakin mempertajam indikasi ke arah ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah, seraya mempertanyakan sejauh mana keseriusan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang sedang melanda Indonesia beberapa bulan belakangan ini. Ditambah lagi berita hoax serta media Indonesia memfokuskan pemberitaan tentang jumlah korban meninggal yang semakin membuat masyarakat menjadi resah.

KUCING ASIA TERINFEKSI CORONA

Hilmi Izaz Robbani

Pada masanya, Indonesia pernah disebut sebagai macan asia karena berhasil lepas dari cengkraman kolonialisme dan imperialisme asing, menumbuhkan perekonomian dengan caranya sendiri, membangun pemerintahan dengan metodenya sendiri, dan lebih dahsyatnya dapat menciptakan ideologi dengan kepercayaan diri serta keteguhan hati. Ideologi tersebut memiliki ciri khas tersendiri dan dipercaya sebagai ideologi yang sempurna karena berhasil menggabungkan beberapa ideologi yang saling bertengan satu sama lain. Namun Lambat laun seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan, mulai dari era Sukarno hingga saat ini yang menjabat sebagai Presiden adalah Jokowi. Gelar macan Asia secara perlahan mulai lepas dari negara Indonesia dan menjadi Kucing Asia, Hal ini dikarenakan terlalu bergantungnya Indonesia pada negara lain seperti China dan Amerika, menumpuknya hutang Negara sehingga rakyat semakin jauh dari kata sejahtera, pejabat negara yang melakukan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta ditambah permasalahan yang baru-baru ini menyebabkan perekonomian Indonesia di Ujung Tanduk yaitu adanya penyebaran COVID-19.

Virus mematikan tersebut bernama Corona atau COVID-19, berasal dari Wuhan, China, yang menyebabkan kematian dengan jumlah total korban meninggal mencapai 3.281 orang. Virus tersebut terus menyebar ke berbagai belahan dunia tak terkecuali Indonesia. Indonesia menduduki posisi tertinggi terkait angka kematian pasien positif COVID-19 di

ASEAN. Presiden Jokowi menyatakan bahwa 2 WNI positif Corona pada awal maret 2020, seiring perkembangan waktu, kasus tersebut terus meningkat sampai dengan tulisan ini dibuat jumlah kasus telah mencapai 893 kasus, total sembuh 35 jiwa dan angka kematian 78 jiwa. Tingkat kematian pasien positif Corona Indonesia jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia. Sampai sejauh ini pasien positif Corona di Malaysia menyenuh angka 1183 jiwa dengan angka kematian 9 jiwa. Perbandingan angka kematian yang sangat jauh tersebut menandakan kurang maksimalnya Pemerintah Indonesia dalam menangani pasien positif Corona. Pemerintah Indonesia pada akhirnya menyatakan agar masyarakat Indonesia tidak keluar rumah, kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Namun, masyarakat Indonesia menghiraukan perintah tersebut karena masyarakat menganggap Pemerintah Indonesia terlalu arogan, pernyataan ini tidak terlepas dari sikap pemerinah yang tidak memberikan bantuan bahan pangan serta tidak maksimalnya pemerintah dalam menyediakan fasilitas kesehaan bagi rumah sakit seperti alat pelindung diri dan *handsanitizer*. Dampaknya, 8 dokter menjadi korban dalam menangani pasien positif Corona.

Pada awal penyebaran virus Corona, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan COVID-19 merupakan jenis penyakit *self limited disease* atau dapat sembuh dengan sendirinya. Lalu disambung pernyataan dari Wakil Menteri Parekraf Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa tahun lalu terdapat kurang lebih sebanyak 1,9 juta wisatawan dari Cina yang berkunjung ke Indonesia. Meski begitu, hingga saat ini pihaknya masih dalam proses perhitungan berapa potensi devisa jika wisatawan dari Cina berkurang. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa kepentingan ekonomi mengalahkan kepentingan kesehatan masyarakat serta dapat dikatakan Pemerintah Indonesia

meremehkan dan tidak siap dalam mengatasi bencana virus Corona di Indonesia. Pada saat pertama kali dinyatakan terdapat warga negara yang positif Corona, pemerintah langsung mengeluarkan protokoler komunikasi terkait warga negara yang positif Corona. Pemerintah Indonesia be-dalih lebih berhati-hati dalam mengungkapkan informasi terkait penelusuran kasus, karena tingkat pemahaman masyarakat Indonesia belum seperti di negara-negara lain. Padahal dinegara lain seperti Korea Selatan, akses informasi selalu disampaikan melalui notifikasi yang ada di smartphome. Informasi tersebut di berikan melalui short message service (SMS) dan media sosial, serta pemberian informasi secara manual dengan memasang spanduk ataupun menggunakan pengeras suara.

Indonesia memang bukan satu-satunya negara yang gagap dalam menghadapi wabah virus Corona. Pada awalnya, Pemerintah China juga di kritik karena kurangnya transparansi dalam melaporkan perkembangan penyebaran virus COVID-19 kepada warga negara-nya dan dunia internasional. Menteri Terawan sebenarnya memiliki waktu yang cukup untuk melakukan persiapan dalam menghadapi atau menangani penyebaran Virus Corona. Ketika wabah ini pertama kali merebak pada awal Januari lalu di Tiongkok, seharusnya Pemerintah Indonesia dapat mempersiapkan langkah-langkah antisipasi dalam penanganan penyebaran virus Corona. Pakar kesehatan Harvard University juga telah memperingatkan Pemerintah Indonesia, sejak pertengahan Februari lalu, tentang lemahnya prosedur deteksi penyebaran virus Corona di pos-pos perlintasan untuk warga Indonesia yang baru pulang dari Wuhan. Namun, Menteri Kesehaan Terawan menyepelekan peringatan tersebut. Hal ini mengakibatkan masyarakat Indonesia semakin khawatir dalam menghadapi penyebaran Virus Corona di Indonesia. Latar belakangnya sebagai jenderal militer dan pengetahuan yang minim soal kesehatan

masyarakat, mengakibatkan tidak banyak yang dapat dilakukan dalam menangani masalah tersebut.

Peran pemerintah dalam mengatasi wabah virus Corona yang menyerang masyarakat, dapat dikaitkan dengan UU nomor 54 /pmk.01/2017 pasal 11c Tentang Aset Negara, “pelaksanaan perencanaan dan pengadaan aset, penyusunan standar minimum rehabilitasi dan/ atau renovasi (upgrade), perencanaan dan pelaksanaan konstruksi aset, pemeliharaan aset, serta monitoring dan evaluasi proses pengadaan, rehabilitasi dan/ atau renovasi (upgrade) dan pemeliharaan aset”. Dalam hal ini dapat dijabarkan mulai dari perencanaan dan pengadaan aset. Dalam proses perencanaan, Pemerintah harus menetapkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan data yang valid agar perencanaan berjalan dengan baik dan pengadaan aset seperti Rumah Sakit Berstandar Nasional/Internasional, obat-obatan, pengadaan dana yang terperinci hingga hal-hal proses penyembuhan masyarakat. Yang kedua ialah penyusunan standar minimum renovasi (upgrade), dimana bidang kesehatan harus melakukan upgrade keseluruhan penjuru Indonesia, seperti menyediakan informasi yang mudah di akses baik secara teknologi maupun pengumuman secara langsung, melakukan tindakan sosialisasi tentang bahaya virus COVID-19 baik secara teknologi maupun secara langsung, membangun rumah sakit disetiap daerah, baik perkotaan maupun daerah-daerah pelosok yang berstandar Nasional/internasional serta menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang memahami tentang virus COVID-19, seperti menyiapkan tenaga medis. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan, Dalam hal ini kelebihan Pemerintah Indonesia yaitu dapat langsung memberikan tindakan pencegahan melalui kebijakan yang dimana pemerintah dapat melakukan pembatasan interaksi untuk meminimalisi penyebaran virus COVID-19.

Kekurangan Pemerintah Indonesia adalah menyediakan tenaga medis untuk menangani pasien positif Corona serta tidak meratanya rumah sakit yang berstandar nasional/internasional diseluruh Indonesia, pendapatan negara juga berkurang yang menyebabkan perekonomian terpuruk, terhambatnya pelayanan publik dan jika terjadi *Lockdown* di kementerian maka tugas negara yang ditanggung semakin berat.

REFERENSI

<https://news.detik.com/internasional/d-4953394/3434-orang-meninggal-karena-corona-spanyol-lampau-angka-kematian-china>

<https://www.COVID19.go.id/situasi-virus-corona/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302162005-20-479814/menkes-virus-corona-penyakit-yang-bisa-semuh-sendiri>

UU NOMOR 54/PMK. 01 2017

CORONA VIRUS SI KECIL YANG MEMATIKAN

Efida Aprilia Herdina Aisyah

Akhir-akhir ini dunia sedang di hadapkan dengan wabah yang mematikan, wabah tersebut berupa Virus. Virus ini disebut sebagai COVID-19 atau biasa di kenal dengan Virus Corona, teridentifikasi pertama kali di Wuhan, China. Virus ini semakin hari semakin menyebar ke berbagai negara di dunia, sebagian besar orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami gangguan pernapasan ringan hingga sedang. Namun dalam beberapa kasus masyarakat yang memiliki riwayat penyakit dalam seperti diabetes, kanker, ataupun penyakit pernafasan kronis virus ini dapat menimbulkan penyakit yang lebih serius dan beresiko tinggi sampai mengancam nyawa. Hingga dengan saat ini vaksin Virus Corona masih belum di temukan, namun telah banyak penelitian atau uji klinis yang sedang berlangsung dalam mengevaluasi perawatan potensial.

Dengan mewabahnya virus ini di hampir seluruh negara membuat pemerintah menetapkan kebijakan guna menangani pandemi COVID-19, salah satunya adalah dengan mengeluarkan kebijakan *Lockdown* wilayah ataupun melakukan *Lockdown* secara terpusat, hal tersebut dilakukan untuk menekan penyebaran Virus COVID-19. Di Indonesia sendiri sampai dengan saat ini tercatat ada 1.046 kasus pasien yang positif Corona namun pemerintah Indonesia tidak menerapkan system *Lockdown* seperti di berbagai negara lain, hal ini di karenakan pemerintah telah mempelajari bagaimana penerapan sistem *Lockdown* di berbagai negara, dimana setiap negara memiliki karakter, budaya dan kedisiplinan yang berbeda-beda.

Meskipun Pemerintah Indonesia tidak menerapkan system tersebut, pemerintah memilih alternatif lain yaitu *social distancing*. Pemerintah Indonesia lebih memfokuskan dalam membatasi interaksi sosial ataupun membatasi jarak karena apabila *Lockdown* tersebut di implementasikan maka akan sangat memukul laju perekonomian Indonesia secara jangka pendek karena banyaknya sebaran virus corona yang hampir terpusat di Jakarta. Sementara kita ketahui bahwa Jakarta merupakan pusat pemerintahan, bisnis, dan perdagangan Indonesia. Beberapa daerah lain di Indonesia juga sudah terdapat sejumlah kasus Virus Corona, seperti pulau Jawa yang lagi-lagi menjadi penggerak roda ekonomi dalam negeri.

Penyebaran virus Corona yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian dunia baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Setelah pandemi Virus Corona masuk ke Indonesia, nilai tukar rupiah menurun drastis mencapai angka Rp. 16.275. Hal ini di sebabkan karena tertekannya mata uang Indonesia akibat dari arus keluar (*capital outflow*) dana asing sejak awal tahun 2020, selain itu virus Corona juga berdampak pada investasi, karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus Corona juga memengaruhi proyeksi pasar dimana investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan *supply chain* atau akibat asumsi pasarnya berubah. Di bidang investasi, China merupakan salah satu negara yang menanamkan modal ke Indonesia, pada 2019 saja realisasi investasi langsung dari China menempati urutan ke dua setelah Singapura.

Indonesia adalah salah satu dari banyak negara yang memberlakukan larangan perjalanan dari dan ke China demi menekan laju pertumbuhan Virus Corona yang semakin meningkat. Dengan adanya larangan perjalanan tersebut maka banyak dari maskapai penerbangan

yang membatalkan penerbangannya. Selain itu dampak dari mewabahnya virus ini dari segi pariwisata juga membuat turunnya angka wisatawan yang ingin berlibur di Indonesia, dengan adanya permasalahan tersebut maka juga mengakibatkan sektor bisnis penginapan dan rumah makan mengalami penurunan angka pendapatan. Tidak hanya itu, Penyebaran virus Corona juga berdampak pada sektor yang juga bisa 'tak selamat' bila *social distancing* bahkan *Lockdown* diberlakukan yaitu pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya para pedagang kaki lima, yang biasanya dengan banyaknya jumlah wisatawan yang datang berkunjung di Indonesia akan membeli oleh-oleh saat akan kembali ke negara asalnya.

Beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak Virus Corona ini adalah menurunkan BI *7-Day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 4.75%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 25 bps menjadi 4.00% dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 25 bps menjadi 5.50%. Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global sehubungan dengan terjadinya COVID-19. Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi (www.bi.go.id).

Di lain sisi, virus Corona tidak hanya berdampak negatif, namun juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah terbukanya peluang pasar ekspor baru. Selain itu, terdapat peluang memperkuat ekonomi dalam negeri karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada

menarik keuntungan dari luar negeri. Kondisi ini juga dapat dimanfaatkan sebagai langkah evaluasi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang.

REFERENSI

<https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>

<https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Perkembangan-Indikator-Stabilitas-Nilai-Rupiah-27032020.aspx>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200326182926-532-487264/pemerintah-usul-lima-poin-dalam-ktt-g20-hadapi-virus-corona>

<https://katadata.co.id/berita/2020/03/24/jokowi-ungkap-dua-alasan-tak-mau-Lockdown-untuk-atasi-corona>

WABAH COVID-19 MEMPENGARUHI EKONOMI POLITIK

Inka Mustika Sari

COVID-19 adalah virus yang memiliki hubungan keluarga dengan virus SARS dan MERS yang mempunyai gejala ringan hingga berat. Virus jenis baru ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, pertama kali virus ini menyebar dan teridentifikasi di kota wuhan China pada bulan desember 2019. Virus COVID-19 ini bisa ditularkan dari hewan ke manusia juga manusia ke manusia. Gejala dari virus ini akan muncul dan terlihat setelah 2-14 hari kedepan setelah terinfeksi, namun bisa juga menular meski belum terlihat gejala awalnya.

Gejala dari virus COVID-19 itu sendiri si penderita akan mengalami :

1. Demam beberapa hari
2. Batuk-batuk
3. Nyeri Tenggorokan
4. Kesulitan bernafas / sesak nafas
5. Flu/pilek

Cara pencegahan virus COVID-19 ialah dengan cara :

1. Cuci tangan yang bersih dengan sabun
2. Hindari menyentuh hewan liar dan unggas liar
3. Hindari menyentuh wajah, mulut dan hidung orang yang tak di kenal
4. Gunakan masker bila berada di tempat umum
5. Makan makanan yang sehat, steril, dan bergizi

6. Periksalah ke dokter terdekat jika mengalami gejala yang seperti saya sebutkan di atas

Saran jika anda bepergian kemana mana

1. Jangan bepergian jika dalam kondisi kurang sehat
2. Bila ada urusan di luar alangkah lebih baik di tunda dulu dan jangan pernah membawa anak kecil jika bepergian

Situasi saat ini telah ditetapkan oleh WHO menjadi pandemi global COVID-19, maka yang harus dipikirkan dan dilakukan adalah tentang bagaimana pentingnya meningkatkan produktivitas dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Baik itu di sektor ekonomi, politik, maupun budaya dengan berbagai program kerja kebijakan nasional. Ekonomi politik sebagai respons terhadap akselerasi kapitalisme (Nashrudin, 2017). Untuk melampaui pandemi global COVID-19 beberapa negara melakukan sistem *Lockdown*, selain itu pemerintah perlu berfokus pada pencegahan penyebaran virus corona dan pengobatan/penyembuhan terhadap pengidapnya, perlu juga mengobati/menyembuhkan lemahnya produktifitas diberbagai sektor ekonomi sebagai langkah *preventif* dan atau *represif* untuk menghindari krisis ekonomi, yang bisa menjalar pada krisis politik dan krisis sosial. Stimulus ekonomi sudah saatnya di pertimbangkan pada sektor-sektor yang lebih memperkuat perekonomian rakyat. Selain memacu produktivitas perekonomian rakyat, juga perlu melaksanakan reformasi ekonomi dimana yang paling mendasar adalah reforma agraria. Apalagi jika kemudian dilanjutkan dengan menghidupkan dan mengembangkan koperasi sebagai bentuk perekonomian yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat maupun ekonomi nasional. Demikian untuk memahami dunia dan merawat Indonesia.

Virus Corona membuat warga dunia tersentak, khawatir, dan dihantui ketakutan. Corona berdampak pada perekonomian Indonesia

seperti kurs mata uang rupiah terhadap dolar turun cukup tajam yaitu mencapai 16.000 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Hal ini dapat dipastikan bisa berakibat fatal pada struktur APBN Indonesia. Negara Kapitalis dapat disamakan dengan konsep masyarakat Kapitalis, sebab negara-bangsa dan batasan mekanisme pembatasan definisi merupakan dasar yang penting pada sifat Kapitalisme, itu yang kemudian menjadi salah satu ciri penting dari lima klasifikasi masyarakat Kapitalis menurut Giddens.

Empat klasifikasi lain masyarakat Kapitalis menurut Giddens, diantaranya: Pertama, layanan tatanan ekonomi sebagai basis utama produksi barang dan jasa di mana keseluruhan populasi masyarakat bergantung pada sektor tersebut. Ketika ciri kapitalisme semacam ini digabungkan dengan pentingnya struktur ekonomi dengan siklus investasi, laba, dan investasi kembali, maka keputusan ekonomi dan pelakunya akan mencapai satu hal penting dalam masyarakat Kapitalis yang tak bisa diterapkan pada masyarakat Pra-kapitalis. Kedua, mendasari hal penting tersebut, perputaran perlu digabungkan dengan perburuhan yang diperluas dengan produk pasar untuk membentuk pemisahan kondisi ekonomi dari perekonomian dan politik Eropa yang feodal secara vertikal dan horisontal. Ketiga, pemisahan atau penyekatan itu diperkirakan berada pada kekayaan individu dalam alat-alat produksi. Dan keempat, pemisahan pemerintahan (Politik) dan perekonomian (Ekonomi) dalam tatanan institusional masyarakat yang kompleks antara kegiatan negara dan kegiatan properti swasta adalah satu hal yang mesti terjadi.

Kebijakan dekontaminasi COVID-19 dengan *Lockdown* merupakan masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik pribadi dan kelompok. COVID-19 tidak akan memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat

tampaknya masih belum bisa memahami bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global dalam studi hubungan internasional setelah munculnya karya Buzan. *Lockdown* terbatas, mandiri atau sukarela, diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk dan tingkat kepadatan yang tinggi. Wajar saja bila sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) amat prihatin akan langkah pemerintah yang dinilai lambat dan amatiran.

REFERENSI

Nashrudin, A. (2017). Ekonomi Politik Media. *Jurnal Komuniti*.

<https://kolom.tempo.co/amp/1320840/wabah-corona-dan-keamanan-nasional>

<https://beritajatim.com/sorotan/corona-globalisasi-dan-dalil-giddens-tentang-kapitalisme/>

KEBIJAKAN *LOCKDOWN*: KESEHATAN MASYARAKAT ATAU STABILITAS EKONOMI

Silvia Wahyu Pradana

Wabah Virus Corona tengah melanda dunia sejak awal tahun 2020, penyebarannya hampir meyeluruh ke berbagai negara di dunia, Indonesia tidak luput dari penyebaran COVID-19. Pada awal maret diumumkan ada 2 orang WNI yang dinyatakan positif mengidap COVID-19, jumlah tersebut semakin meningkat sampai dengan tanggal 27 April 2020 mencapai angka 1046 kasus. Penyebaran virus ini sudah memasuki seluruh Provinsi di Indonesia. Hal tersebut tentu saja membuat seluruh masyarakat menjadi resah dan panik. Pemerintah Pusat sendiri telah mengambil tindakan pencegahan dengan menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk warganya mengurangi dan membatasi mobilitas sosial serta mengurangi kegiatan yang melibatkan orang banyak. Himbauan tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko penularan virus corona, karena virus ini daya penularannya sangat cepat.

Menanggapi himbauan tersebut, para Kepala Daerah dengan langkah cepat membuat kebijakan dengan merumahkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang banyak, seperti kegiatan kantor dan perusahaan, sekolah, bahkan kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berjamaah. Artinya, kegiatan tersebut tetap berjalan seperti biasa tetapi dilakukan dari rumah masing-masing dengan cara daring atau online. Meskipun telah membuat himbauan kepada masyarakat agar sebisa mungkin melakukan kegiatan di rumah, tetapi Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan sampai saat ini tidak ada pemikiran untuk mengeluarkan kebijakan

Lockdown seperti yang dilakukan negara - negara lain yang juga terjangkit wabah corona.

Presiden Joko Widodo memilih tidak mengeluarkan kebijakan *Lockdown*, meskipun beberapa politikus mendesaknya. Dilansir dari Wicaksono (2020) dalam CNN Indonesia, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Irwan mendesak Jokowi untuk mengambil sebuah langkah tegas dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. *Locdown* harus dilakukan agar Pemerintah tidak semakin terlambat dalam menangani wabah ini. Kebijakan *locdown* ini dapat menimalisir penyebaran Virus Corona. Mengingat jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis khusus untuk menangani COVID-19 masih sangat minim. Apabila jumlah pasien positif COVID-19 semakin meningkat, hal ini akan membuat Pemerintah semakin keteteran.

Pemerintah seharusnya mengutamakan kesehatan masyarakat dibandingkan stabilitas ekonomi. Perekonomian Indonesia akan tetap turun walau pun tanpa kebijakan *Lockdown*. Kebijakan *Lockdown* tidak perlu melibatkan militer, cukup penetapan kebijakan tersebut melalui Peraturan Presiden agar seluruh masyarakat melakukan segala kegiatan belajar maupun bekerja dari rumah. Apabila tidak berikan *legal standing* yang tegas dan hanya berupa himbauan, mayoritas masyarakat tidak akan menaati aturan tersebut karena bentuknya hanya himbauan, hal ini akan mengakibatkan penyebaran virus corona semakin masif.

Opini berbeda muncul dari pakar ekonomi apabila kebijakan *Lockdown* benar-benar diterapkan. Sektor yang akan mengalami dampak terburuk dari kebijakan ini adalah bidang ekonomi. Menurut Direktur Riset *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia Piter Abdullah dilansir dari Laucereno & Indraini (2020) dalam Detik Finance menjelaskan apabila Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan *Lockdown*

di Indonesia dampaknya jauh lebih besar dibanding negara-negara lain. Mengingat jumlah tenaga kerja Indonesia lebih banyak di sektor informal. Tenaga kerja sektor informal yang dimaksud adalah para pedagang kaki lima, pedagang asongan, tukang becak, dan pengusahaan UMKM lainnya. Apabila terjadi *Lockdown*, masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah lah yang akan sangat dirugikan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah susah payah. Maka dari itu, keputusan atas kebijakan *Lockdown* harus dipikirkan matang-matang bukan hanya asal memutuskan. Akan terdapat dampak positif dan negative dari berbagai bidang yang harus dipertimbangkan. Jika kebijakan tersebut diambil, maka Pemerintah harus bertanggung jawab atas nasib rakyatnya, yaitu dengan memberikan bantuan dan pelayanan seperti suplai makanan, obat-obatan, keringanan untuk biaya listrik, air dan jaringan internet.

Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat yang kurang mampu tidak merasa terbebani akibat Kebijakan *Lockdown*. Karena saat kebijakan tersebut berlaku, mereka tak bisa bekerja seperti biasa sehingga tidak ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka dari itu, pemerintah wajib memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat.

Namun dengan tidak dikeluarkannya kebijakan *Lockdown*, membuat penyebaran virus corona semakin luas serta ada kemungkinan jumlah korban jiwa akan semakin bertambah. Sedangkan pemerintah juga tetap harus mempertimbangkan dampak stabilitas ekonomi apabila kebijakan *Lockdown* benar-benar diterapkan. Seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa tanpa *Lockdown* pun perekonomian Indonesia akan menurun. Apalagi jika Pemerintah benar-benar menerapkan kebijakan *Lockdown*, perekonomian Indonesia akan semakin terpuruk. Hal ini telah

dibuktikan dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS, bahkan kini rupiah disebut-sebut sebagai mata uang terlemah di Asia.

Selain itu, kebijakan *Lockdown* akan merambat ke permasalahan sosial. Apabila stabilitas ekonomi terus terpuruk, akan terjadi penjaran oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal itu disebabkan karena mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama *Lockdown*, dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang menyalahi hukum. Penjarahan, pencurian, dan perampokan akan marak terjadi akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Maka dari itu, untuk mengambil langkah *Lockdown*, pemerintah harus menyiapkan diri atas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat kebijakan tersebut.

REFERENSI

- Laucereno, S. F., & Indraini, A. (2020). Perlukah Indonesia *Lockdown* Seperti Malaysia dan Negara Lain? Retrieved March 27, 2020, from DetikFinance website: <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4948302/perlukah-indonesia-Lockdown-seperti-malaysia-dan-negara-lain/2>
- Wicaksono, A. (2020). Untung dan Rugi Jokowi Tetapkan “*Lockdown*” Corona. Retrieved March 26, 2020, from CNN Indonesia website: <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200317161737-20-484261/untung-dan-rugi-jokowi-tetapkan-Lockdown-corona>